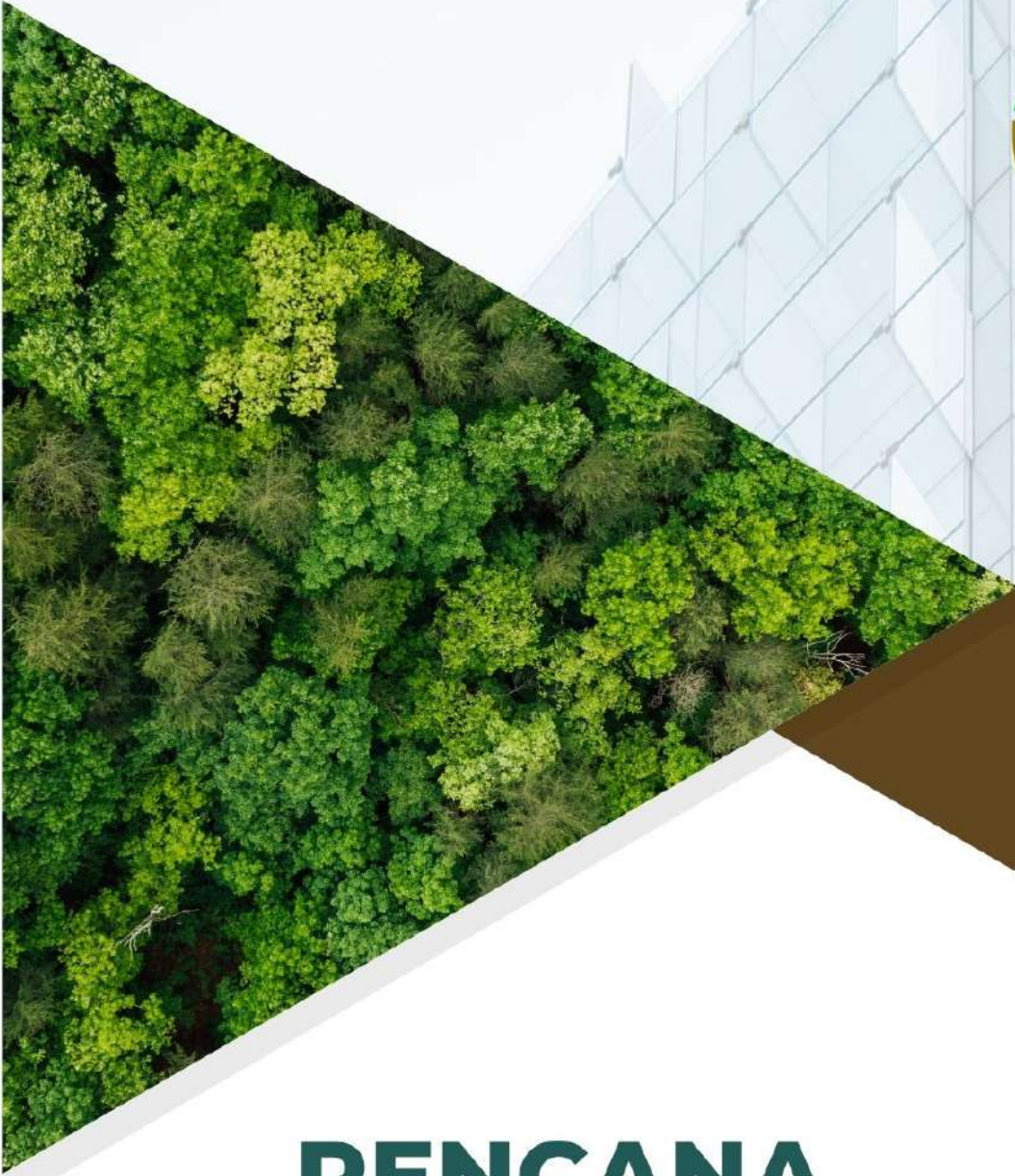


**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**



**RENCANA
KERJA 2025**

**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
WILAYAH XIII**

MAKASSAR



KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : SK. 33 /BPHL-XIII/TU/REN.0/12/2024

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XIII TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 telah ditetapkan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 sebagaimana huruf a perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
 11. Peraturan menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK. 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XIII TAHUN 2025
- KESATU : Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi:
- a. Pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII;
 - b. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

an MENTERI KEHUTANAN
KEPALA BPHL WILAYAH XIII



MAHYUDDIN
NIP. 19750407 200212 1 004

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2025. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dokumen Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII merupakan dokumen sementara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai selama masa transisi pemerintahan. Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 ini akan disempurnakan kembali setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025-2029.

Makassar, 30 Desember 2024

Kepala Balai,



Dr. Mahyuddin, S.P., M.P
NIP.19750407 200212 1 004

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar i
- Daftar Isi ii
- Daftar Tabel iii
- Daftar Gambar iv
- I. PENDAHULUAN 1
 - A. LATAR BELAKANG 1
 - B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 4
 - C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 5
- II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 8
 - A. CAPAIAN KINERJA BPHL WILAYAH XIII TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 8
 - B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 25
- III. RENCANA KERJA TAHUN 2025 31
 - A. STRATEGI MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025 31
 - B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2025 34
- IV. PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Lestari	4
2. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XIII	7
3. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024	8
4. Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2023	9
5. Prognosis Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	14
6. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2023	25
7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	27
8. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2025	35
9. Matriks Pemetaan Peran (<i>Crosscutting</i>) dalam Pencapaian Kinerja BPHL Wilayah XIII	38
10. Matriks Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2025	42
11. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2025	47

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar/Diagram</i>	<i>Halaman</i>
1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.....	6
2. Rincian Output Ditjen PHL dalam Prioritas Nasional RKP 2025	32
3. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL.....	36
4. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL	37
5. Pohon Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2025	46

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan pada masa transisi dengan tema : "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP Tahun 2025 sebagai tahap awal dalam pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sasaran pembangunan Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Selain menjadi awal periode penguatan transformasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Tahun 2025 menjadi tahun transisi bagi kementerian/lembaga salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara terdapat pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Tema pembangunan Kehutanan 2025 : "Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah" dengan sasaran pembangunan kehutanan antara lain : (1) Pertumbuhan PDB dan Ekspor Kehutanan sebesar 3-5 %; (2) Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan sebesar 7-8 % dan (3) Penurunan laju penyusutan hutan sebesar 3-4 %.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghasilkan analisis strategis dalam bentuk matriks *SWOT* sehingga dapat membantu pengambilan langkah-langkah strategis pengelolaan hutan lestari. Matriks *SWOT* pengelolaan hutan lestari dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Lestari

S trength (Kekuatan)	W eakness (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan hutan produksi 68,83 juta hektar dan hutan lindung 29,66 juta hektar 2. Potensi sumberdaya hutan produksidan hutan lindung, meliputi: hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang tinggi. 3. Kewenangan Ditjen PHL dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan secara lestari. 4. Sudah terbentuknya 347 KPHP dan 197 KPHL sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak. 5. Capaian pembangunan hutan produksi periode 2015-2019 yang menjadi titik-tolak untuk pemenuhan kinerja pada periode tahun 2020-2024 6. SDM Ditjen PHL yang kompeten, profesional dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi serta didukung dengan peralatan yang memadai. 7. SI-PHL telah mampu mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi pada Ditjen PHL serta mampu memberikan informasi lacak balak hasil hutan dan penerimaan PNBK. 8. SVLK sebagai jaminan legalitas produk kayu dan menjadi benchmar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPH sebagai pengelola di tingkat tapak belum semua memiliki kelembagaan (belum mantap), sarana prasarana dan pendanaan sehingga masih terdapat kawasan hutan yang open access. 2. Masih adanya kasus pelanggaran (perdata, pidana dan administartif) berkenaan dengan pengelolaan hutan lestari. 3. Pengelolaan hutan lestari belum terwujud secara holistik (perencanaan, pemanenan, pembinaan, perlindungan dan pengamanan) pada tingkat tapak, karena praktik pengelolaan hutan tidak dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari 4. Belum selarasnya Rencana Pengelolaan Hutan yang disusun Unit Manajemen dengan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN). 5. Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum menjadi pengarusutamaan (mainstream) dalam pengembangan/diversifikasi industri kehutanan. 6. Regulasi yang ada kurang fleksibel terhadap kendala/permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan di lapangan. 7. Daya saing produk kehutanan masih rendah dan masih terjadi ekonomi biaya tinggi
O pportunities (Peluang)	T hreat (Tantangan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan akan lahan untuk pangan, energi dan obat-obatan masih tinggi dan dapat dipenuhi dari kawasan hutan produksi. 2. Permintaan atas bahan baku hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terus meningkat setiap tahun. 3. Adanya mitigasi iklim untuk memenuhi target NDC akan membuka peluang perdagangan karbon dari kawasan hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Walaupun tren deforestasi terus menurun, tetapi tetap memberikan dampak semakin berkurangnya kawasan hutan produksi. 2. KARHUTLA masih menjadi pemicu terjadinya deforestasi, degradasi dan penurunan produktivitas kawasan hutan produksi serta berdampak pada terganggunya perekonomian. 3. Konflik tenurial yang berlarut-larut berpengaruh terhadap ketidakpastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.

4. Implementasi teknik silvikultur intensif, penerapan pemanenan berdampak rendah dan intensifikasi pengelolaan hutan akan mampu meningkatkan produktivitas hutan.	4. Tekanan terhadap kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih sangat tinggi.
5. Implementasi multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan produksi.	5. Dengan luas kawasan hutan sekitar 63 % dari luas daratan Indonesia, kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional sangat rendah, hanya sebesar 0,6 % menyebabkan sektor kehutanan selalu dipandang sebelah mata dalam pembangunan nasional
6. Implementasi SVLK mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk industri kehutanan Indonesia	

Sejalan dengan sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menjalankan 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Arah program pengelolaan hutan berkelanjutan adalah sebagai berikut : (a) Penguasaan hutan yang berkeadilan (Penyelesaian sawit non prosedural dalam kawasan hutan, penerbitan/pencabutan izin pemanfaatan kawasan hutan, audit dan pemberlakuan sanksi); (b) Hutan sebagai sumber swasembada pangan (Penyediaan lahan untuk food estate, perhutanan sosial untuk mendukung makan bergizi gratis); (c) Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia (rehabilitasi hutan dan lahan, menjaga *biodiversity*, antisipasi kebakaran hutan); (d) Indonesia satu peta dalam *One Map Policy*.

Program Dukungan Manajemen mendukung pencapaian sasaran program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang jelas, teratur dan efektif dengan arahan sebagai berikut : (a) Peningkatan reformasi birokrasi melalui perencanaan dan penganggaran program yang berorientasi pada dampak; (b) Digilitasi layanan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Digilitasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan, digilitasi pembayaran non-tunai); (c) Pemenuhan pembayaran gaji; (d) Operasional perkantoran.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun merujuk pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 sebagai titik awal penguatan transformasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai wilayah kerja pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII diwujudkan dalam program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas pokok melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII menyelenggarakan fungsi :

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas Kepala Balai dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kepala Balai memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - b. Memimpin pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. Memimpin pemantauan dan evaluasi dibidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
 - d. Memberikan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;
 - e. Memberikan penugasan dalam urusan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi.
2. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
3. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan

pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII

Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berjumlah 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 5 (lima) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), seperti dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XIII

No.	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII												
1	Eselon III-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Khusus	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Jumlah		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Sub Bagian Tata Usaha												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	4	2	0	0	0	0	4	2	6
3	Fgs. Khusus	0	0	6	1	0	0	0	0	6	1	7
Jumlah		1	0	10	3	0	0	0	0	11	3	14
Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
2	Fgs. Khusus	1	0	4	7	2	2	0	0	7	9	16
Jumlah		1	0	8	7	2	2	0	0	11	9	20
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	4
2	Fgs. Khusus	4	0	4	5	1	1	0	0	9	6	15
Jumlah		7	1	5	5	1	1	0	0	13	7	20
Total		14	1	23	11	1	3	0	0	40	19	59

Sumber : SIMPEG Tahun 2024

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA BPHL WILAYAH XIII TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Tahun 2023 melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Balai Tahun 2020 - 2024. Keberhasilan kegiatan ini didasarkan atas pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditentukan selama kurun waktu 2020 - 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan
		2. T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	2. T2.S2.1.1.1 Jumlah Produksi Kayu Bulat
		3. T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	3. T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
		4. T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	4. T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan
		5. T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	5. T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
2	Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

Untuk capaian kinerja kegiatan dan capaian realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. *Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2023*

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Realisasi Capaian Output		Realisasi Capaian Anggaran (Rp.)		Persentase (%)
						Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Hektar						
		T1.S4.1.1.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH)	Juta Ha						
			T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	KPH	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga	1 Lembaga	275.263.000	275.258.774	100
		T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	KPH	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	1 Lembaga	230.777.000	230.724.930	100	

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Realisasi Capaian Output		Realisasi Capaian Anggaran (Rp.)		Persentase (%)
						Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
2	T2.S2 Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatkan kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH)	Unit						
			T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Ton	Kinerja Multiusaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	514.255.000	514.245.637	100
			T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Unit	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	354.567.000	354.536.643	100
		T2.S2.1.1.1.2 Meningkatkan investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	175.598.000	175.597.156	100

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Realisasi Capaian Output		Realisasi Capaian Anggaran (Rp.)		Persentase (%)	
						Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)		
			T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD							
3	T2.S3. Meningkatkan ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m ³	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	317.064.000	317.063.183	100	
					Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	378.431.000	375.430.780	100	
		T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH)	Juta ton							
			T2.S3.1.1.1.2.2 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	1 UMKM	2 UMKM	780.552.000	780.549.243	100	

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Realisasi Capaian Output		Realisasi Capaian Anggaran (Rp.)		Persentase (%)
						Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1.1.1.1.1 Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Wajib Bayar	Pengawasan dan pengendalian PNBPN pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	232.180.000	232.180.000	100
			T2.S4.1.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Unit	Pemantauan dan Evaluasi bidang iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	123.065.000	122.823.285	99,80
5	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Hektar	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	95.000.000	94.998.558	100

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Realisasi Capaian Output		Realisasi Capaian Anggaran (Rp.)		Persentase (%)
						Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
B	Program Dukungan Manajemen									
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Perkantoran	82 Poin	82 Poin	8.056.838.000	8.056.807.706	100
T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)			Level	Penilaian SPIP	Level 4	Level 4				
T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)			Laporan	Layanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	180.000.000	179.999.700		100

Untuk prognosis capaian kinerja kegiatan dan prognosis capaian realisasi anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Prognosis Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1	T1.S4.1.1.1.1.1	Hektar					
					Meningkatnya luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)						
					T1.S4.1.1.1.2	T1.S4.1.1.1.2.1	Juta Ha					
					Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH)						
T1.S4.1.1.1.2.2	T1.S4.1.1.1.2.2	KPH	Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga	1 Lembaga	399.195.000	100					
T1.S4.1.1.1.2.3	T1.S4.1.1.1.2.3	KPH	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	1 Lembaga	222.061.000	100					

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
2	T2.S2 Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1 Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH)	Unit					
						T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Ton	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	461.428.163.000	100
						T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Unit	Fasilitas pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	213.499.000	99,90
						T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	453.549.750

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
						T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD	Fasilitasi Implementasi RKUPH/ RKTPH	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	238.881.665	99,99
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1 Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m ³	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	227.819.197	99,93
								Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	516.176.620	99,96
					T2.S3.1.1.1.2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1 Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH)	Juta ton					
					T2.S3.1.1.1.2.2	UMKM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	3 UMKM	3 UMKM	672.789.650	100	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
4	T2.S4. Meningkatkan Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBPFungsional Kehutanan	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBPF dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBPF dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBPF dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Wajib Bayar	Pengawasan dan pengendalian PNBPF pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	174.652.940	99,99
						T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Unit	Layanan luran dan Penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	145.787.933	99,99
5	T3.S3 Meningkatkan pemanfaatan hutan oelh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Hektar	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	109.845.720	99,99

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)		
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
B	Program Dukungan Manajemen												
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Perkantoran	83 Poin	83 Poin	10.288.442.000	100	
						T4.S2.1.1.1.2.2 Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Penilaian SPIP	3,5 Poin	3,7 Poin			
						T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Laporan	Layanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	149.308.634	100	
							Unit	Layanan Sarana Internal	77 Unit	77 Unit	269.200.000	99,77	
						Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	82,5 poin	82,5 poin	7.300.000	100	

Sampai dengan Desember 2024 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka usaha pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dengan Rincian Output sebagai berikut :

Rincian Output : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Target Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 83 Poin dan untuk target pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah yaitu 83 poin. Tahun 2024 penilaian mandiri SAKIP pun di lakukan pada BPHL Wilayah XIII dengan nilai 87,86 poin. Dalam rangka implementasi SAKIP pada BPHL Wilayah XIII ditempuh beberapa langkah yaitu : (1) Meningkatkan pemahaman mengenai implementasi SAKIP lingkup BPHL Wilayah XIII; (2) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan strategi pencapaian SAKIP lingkup Ditjen PHL; (3) Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh tim Auditor Inspektorat Wilayah III; (4) Melaksanakan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada e-SAKIP KLHK.

Rincian Output : Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Perolehan nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024 telah mencapai pada 4,445 poin dengan tingkat level 4, sedangkan untuk nilai maturitas BPHL Wilayah XIII mencapai perolehan nilai Maturitas SPIP sebesar 3,7 poin pada Level 3 (Terdefinisi). Sebagai upaya peningkatan kualitas SPIP, satuan kerja lingkup Ditjen PHL melaksanakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal KLHK, yaitu antara lain : (1) Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Pelaksanaan RPI Tahun 2024; (2) Pendampingan Reviu Rencana Pengendalian Intern Lapis Dua; (3) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengendalian Intern 2025 dan Manajemen Resiko Lingkup Ditjen PHL; dan (4) Bimbingan Teknis Pengendalian Resiko pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Ditjen PHL.

Rincian Output : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel

Kegiatan penunjang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan antara lain berupa kegiatan konsolidasi dan rekonsiliasi pemutakhiran data pada sistem keuangan SAKTI untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2023, Laporan Keuangan per Triwulan Tahun 2024, Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2024, Penyusunan RKBMN Tahun

2025 dan Evaluasi Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja, Koordinasi Pelaporan Capaian Output, Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Negara di KPKNL, Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA oleh Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bimbingan Teknis Pelaporan dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024.

Rincian Output : Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan

Dalam rangka peningkatan perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, pada Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJpd dan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH dan beberapa kegiatan pendukung lainnya. Pada BPHL Wilayah XIII terdapat 61 unit KPH, yang tersebar pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit KPH, Provinsi Sulawesi Barat 12 unit KPH dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 25 unit KPH. Terkait penyusunan dan pengesahan RPHJP, untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit KPH telah pengesahan RPHJP dan sudah sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit KPH telah memiliki RPHJP dan hanya 1 unit KPH yang sudah sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk 11 unit KPH lainnya masih dalam proses penyusunan RPHJP sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 18 unit KPH yang telah pengesahan RPHJP tetapi belum sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan 7 unit KPH masih dalam proses pengesahan RPHJP.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis KPH yang dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan KPH pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII. Kegiatan ini dilakukan pada beberapa unit KPH yaitu pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (KPH Sawitto dan KPH Bila), pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (KPH Gularaya, KPH Mekongga Selatan, KPH Mekongga Utara dan KPH Laiwoi Utara) dan pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat (KPH Mamasa Tengah, KPH Karama, KPH Bonehau Kalumpang, KPH Karama). Kegiatan pendukung lainnya berupa kegiatan penilaian KPH Efektif dengan bekerjasama dengan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Dinas Kehutanan Provinsi. Pemilihan objek KPH efektif berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi,

yang kemudian melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim gabungan dari Direktorat BRPH, BPHL Wilayah XIII dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian KPH Efektif Tahun 2024 dilaksanakan di KPH yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu KPH Ulu Bila dan KPH Cenrana pada Kabupaten Bone, KPH Saddang I Kabupaten Toraja dan KPH Jeneberang Kabupaten Gowa

Rincian Output : Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan

Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan Tahun 2024 terdiri dari kegiatan : (1) Fasilitasi Pelayanan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada 2 (dua) unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu PT. Rimba Alam Utama di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada PT. Lindungi Bumi Pertiwi; (2) Pembinaan Teknis Pengajuan PBPH yang bertujuan untuk mendorong percepatan penyesuaian PKSO menjadi PBPH atau PPPS untuk mewujudkan pemanfaatan hutan lestari dan peningkatan PNBP sektor kehutanan; dan (3) Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pemanfaatan Hutan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan

Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dilaksanakan dengan (1) Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan oleh PBPH di wilayah kerja PBPH PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) Batu Bolong dan GAPOKTANHUT Bubun Bila di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan PBPH pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII, dan (2) Kegiatan Identifikasi/Pemetaan Konflik pada pada 3 (tiga) PBPH yaitu PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa, PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna, PT. Inhutani Kabupaten Gowa dan 3 (tiga) Kelompok Tani Hutan yaitu KTH Lagara Kabupaten Soppeng, KTH Lemo Kabupaten Bone dan KTH Siparappe Kabupaten Pinrang.

Rincian Output : Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan pembinaan perlindungan hutan, fasilitasi dan pembinaan multiusaha kehutanan, identifikasi dan verifikasi multiusaha kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII antara lain pada Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Mamuju Tengah.

Rincian Output : Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui pelaksanaan Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Tahun 2024, kegiatan pengawasan dan pengendalian badan usaha pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/Produksi Hasil Hutan/ Multiusaha Kehutanan dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan pada Pemegang PBPH/Perizinan Lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi serta memonitoring pelaksanaan kinerja PBPH/Perizinan lainnya yang ada di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Kegiatan ini dilaksanakan antara lain pada Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Muna pada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH

Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan : (1) Pengawasan dan pengendalian implementasi RKUPH/RKTPH yang dilaksanakan pada unit PBPH yaitu PT.Seleraya Agri di Kabupaten Muna, PT. Zedsko Permai Di Kabupaten Mamuju, PT. Inhutani Kabupaten Toraja dan PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa; (2) Bedah Kinerja PBPH dilaksanakan di

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait pemenuhan kewajiban PBPH yang telah dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut PBPH.

Rincian Output : Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan salah satunya dengan memberikan Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan yaitu : (1) Bimbingan Teknis (SIGANISHUT, SI-PUHH dan SI-PNBP) di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; (2) Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban PUHH dan PNBP untuk memberikan pendampingan terkait pemenuhan kewajiban pelaksanaan PUHH dan pembayaran iuran kehutanan dan/atau piutang Negara.

Rincian Output : Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil hutan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar usaha pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta kewajiban terkait iuran kehutanan terpenuhi. Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan pada Wajib Bayar (WB) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu pada KPH Tina Orima Kabupaten Bombana, KTH Citra Alam Matajang Kabupaten Konawe dan PHAT Nasrullah Faisal Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Fasilitasi pembinaan usaha pengolahan hasil hutan melalui kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Legalitas Pengolahan Hasil Hutan dan Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Harga Pasar pada PBPHH di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain : UD. Sabbang Loan Kabupaten

Luwu Utara, UD. Usaha Wajo Kabupaten Luwu Utara, UD. Zakiyah Mandiri Kabupaten Wajo, UD. Putra Masale Kabupaten Bone, UD. Nurul Utama Kabupaten Wajo, CV. Panrita Lopi Marine Kabupaten Bulukumba, LM Matahari Kabupaten Wajo, UD. Ki Kasha Kabupaten Sidrap, UD. Karya Farhan Kabupaten Maros, UD. Bersahaja Kabupaten Maros, UD. Sinar Arafah Kabupaten Jeneponto.

Rincian Output : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dilaksanakan sebagai upaya untuk memonitoring proses pelaksanaan usaha yang baik, tertib dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan : (1) Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain : UD. Neka Indah Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Pebriadi Kabupaten Luwu Timur, UD. Miftahul Jannah Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Abd. Munir Kabupaten Luwu Timur, UD. Agung Irawan Kabupaten Kolaka, UD. Sinar Permai Kabupaten Konawe, UD. Nur Ilahi Kabupaten Jeneponto, UD. Awal Harapan Baru Kabupaten Jeneponto, UD. Semoga Bahagia Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Murni Kabupaten Luwu Timur dan CV. Nur Anisa Kabupaten Konawe Selatan; dan (2) Temu Usaha PBPHH yang dilaksanakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL

Fasilitasi dan pembinaan UMKM Tahun 2024 dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain : (1) Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng; (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktor SVLK di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu bagi 3 (tiga) unit usaha PBPHH yaitu UD. Daffa Jaya di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, UD. Putra Masale di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan UD. Reyhan Pratama di Kota

Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara; dan (4) Sosialisasi Peraturan SVLK di 5 (lima) kabupaten pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone dan Kabupaten Bantaeng.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

Capaian Serapan Tahun Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Capaian serapan anggaran kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian serapan anggaran kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2023

Kode	Kegiatan / Rincian Output	Pagu (Rp)	Prognosis Realisasi Rp)	%
Program Dukungan Manajemen				
5396.EBA.				
5396.EBA.962	Layanan Umum	180.000.000	180.000.000	100
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	8.058.838.000	8.058.838.000	100
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan			
6729 BIC	Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	275.263.000	275.263.000	100
6729 QDB	Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	230.777.000	230.777.000	100
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan			100

Kode	Kegiatan / Rincian Output	Pagu (Rp)	Prognosis Realisasi Rp)	%
6730 BIH	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	175.598.000	175.598.000	100
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan			100
6731 BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	95.000.000	95.000.000	100
6731 BDH	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	354.567.000	354.567.000	100
6731 QIH	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	514.255.000	514.255.000	100
6732	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			
6732 BDH	Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	123.065.000	123.065.000	100
6732 BIH	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	232.180.000	232.180.000	100
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan			
6733 BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	317.064.000	317.064.000	100
6733 QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	780.552.000	780.552.000	100
6733 QIH	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	378.431.000	378.431.000	100
	TOTAL	11.713.590.000	11.713.590.000	100

Prognosis Capaian Serapan Tahun Anggaran Kegiatan Tahun 2024

Capaian serapan anggaran kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Prognosis capaian serapan anggaran kegiatan pada Tahun 2024 sampai Bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran (Rupiah)				Realisasi	(%)
		Pagu dengan Blokir	Blokir	Target tanpa Blokir			
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	855.334.000	234.078.000	621.256.000	621.948.065	99.99	
6729.BDB.001	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	414.612.000	15.417.000	399.195.000	399.152.779	99.99	
6729.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	440.722.000	218.661.000	222.061.000	222.055.786	100	
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6730.BIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.024.578.000	395.000	1.024.183.000	1,023.458.949	99.93	
6731.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	109.915.000	0	109.915.000	109.845.720	99.94	
6731.BDH.002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	213.499.000	0	213.499.000	213.303.401	99.91	
6731.QAC.002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	239.211.000	77.000	239.134.000	238.881.665	99.89	
6731.QIH.001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	461.953.000	318.000	461.635.000	461.428.163	99.96	
6732	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	384.077.000	63.600.000	320.477.000	320.440.873	99.99	

6732.BDH.002	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	146.599.000	801.000	145.798.000	145.787.933	99.99
6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNPB Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	237.478.000	62.799.000	174.679.000	174.652.940	99.99
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1.562.333.000	145.148.000	1.417.185.000	1.416.785.467	99.97
6733.BDH.002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	368.463.000	140.493.000	227.970.000	227.819.197	99.93
6733.QDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	673.000.000	180.000	672.820.000	672.789.650	100
6733.QIH.001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	520.870.000	4.475.000	516.395.000	516.176.620	99.96
029.03.WA. Program Dukungan Manajemen						
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	10.467.760.000	30.007.000	10.437.753.000	10.437.672.202	100
5396.EBA.962	Layanan Umum	162.246.000	12.935.000	149.311.000	149.308.634	100
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.305.514.000	17.072.000	10.288.442.000	10.288.363.568	100
5396.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBB.951	Layanan Sarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
5396.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
Jumlah		15.054.385.000	502.808.000	14.551.577.000	14.549.615.806	99.99

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 didukung dengan pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-029-03.2.426964/2024 Tanggal 24 November 2023, dengan total anggaran sebesar Rp. 16.148.565.000,- (Enam belas miliar seratus empat puluh delapan juta

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pagu anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 mengalami beberapa revisi yang mengakibatkan adanya blokir, perubahan informasi kinerja dan perubahan jumlah pagu, yaitu antara lain :

1. Bulan Januari 2024, BPHL Wilayah XIII mendapatkan proporsi pencadangan anggaran sebesar Rp. 430.563.000,- (Empat ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Memorandum Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : M.6/PHL/SETPHL/KEU.0.2/B/1.2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal *Automatic Adjustment (AA)* lingkup Ditjen PHL T.A 2024;
2. Bulan Februari 2024 dilakukan penyelarasan atas informasi kinerja sebagai sinkronisasi Rencana Kerja Tahun 2024 pada aplikasi SAKTI sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaporan kinerja, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : ND. 144/SETPHL/PEHKT/REN.0.0/B/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Revisi Informasi Kinerja Tahun 2024;
3. Bulan Mei 2024 dilakukan revisi penambahan blokir *Automatic Adjustment (AA)* dan pemenuhan belanja pegawai yaitu untuk kebutuhan kenaikan tunjangan kinerja PNS dan pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja PPPK. Pemenuhan blokir AA Program Dukungan Manajemen diperoleh dari realokasi dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Penambahan blokir AA sejumlah Rp. 325.975.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bulan Juli 2024, dilaksanakan revisi pemenuhan belanja pegawai Tahun 2024 sesuai dengan Memorandum Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor M. 26/PHL/SETPHL/REN.0.1/B/5/2024 Tanggal 13 Mei 2024 hal Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Lingkup Ditjen PHL Tahun 2024. Pagu anggaran BPHL Wilayah XIII berkurang menjadi Rp. 15.899.160.000,- (Lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pengurangan pagu sebesar Rp. 249.405.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) dan dialihkan ke pusat yang berasal dari pagu kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Selain itu terdapat realokasi anggaran ke Belanja Pegawai BPHL Wilayah XIII dari pagu kegiatan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp. 271.843.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.794.227.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari Program Dukungan Manajemen;

5. Bulan September 2024, berdasarkan Memorandum Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : M. 43/PHL/SETPHL/REN.0.1/B/9/2024 tanggal 17 September 2024 perihal Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment (AA)* Ditjen PHL Tahun 2024 dan Optimalisasi Tahap II. Revisi ini mengakibatkan pagu anggaran BPHL Wilayah XIII berubah menjadi Rp. 15.054.385.000,- (Lima belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu berkurang sebesar Rp. 844.775.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu pada revisi ini juga terdapat realokasi penambahan pagu Belanja Pegawai lingkup BPHL Wilayah XIII dan pengisian alokasi Rincian Output generik baru 5396.EBD. Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai penyesuaian Rincian Output yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dengan tujuan meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang merupakan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2024.
6. Bulan November 2024, berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : ND. 541/PHL/SETPHL/REN.0.0/B/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Penghematan Belanja Perjalanan Dinas lingkup Ditjen PHL T.A 2024. BPHL Wilayah XIII melakukan penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 171.515.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran kinerja juga tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 tentang Standar Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang menjelaskan bahwa capaian RO, nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen).

III. RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. STRATEGI Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 terbagi atas kelompok prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan bidang. Prioritas Nasional (PN) pada RKP dibagi menjadi 8 (delapan) yaitu antara lain :

1) Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2) Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;

3) Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4) Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan genderserta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

5) Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6) Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

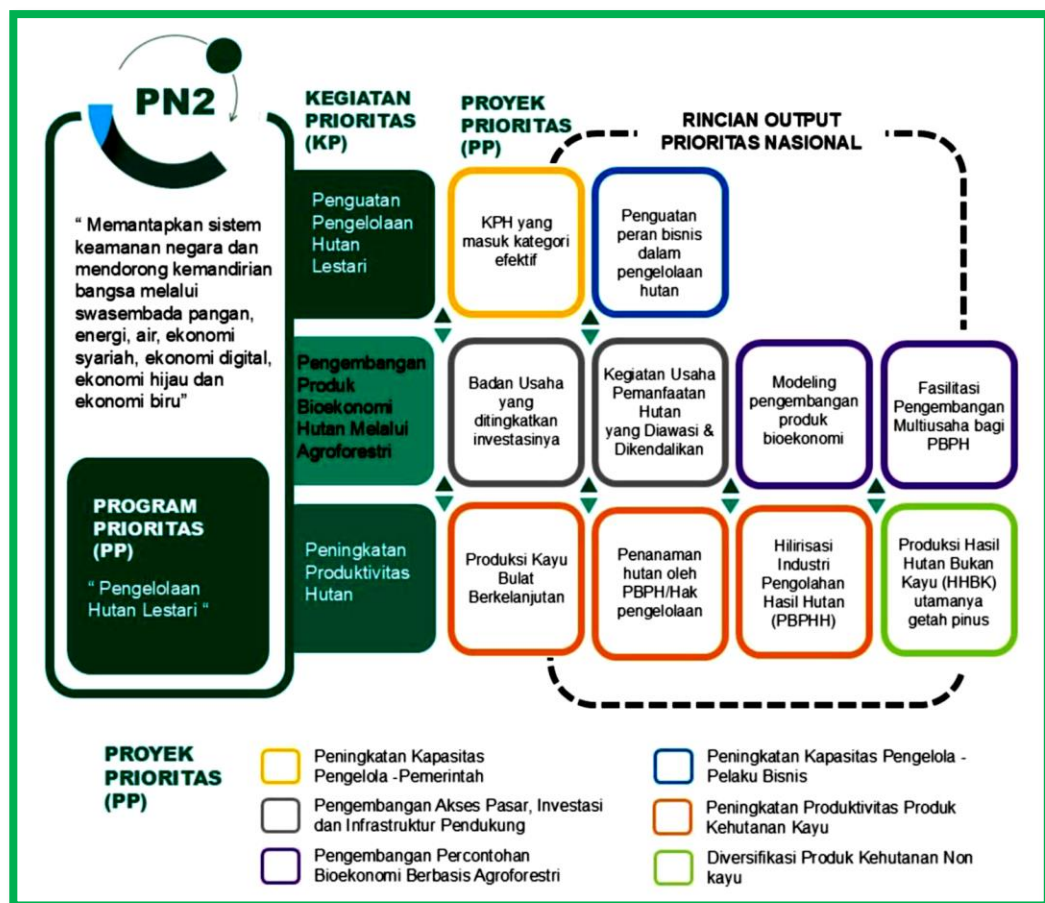
7) Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;

8) Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru". Dukungan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada PN2 diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) Rincian Output pada Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2025 yang secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Rincian Output Ditjen PHL dalam Prioritas Nasional RKP 2025

Strategi Ditjen PHL dalam mendukung Prioritas Nasional (PN2) dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola tapak, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi produksi hasil hutan yang didukung oleh peredaran hasil hutan yang tertib, hilirisasi industri hasil hutan melalui legalitas kayu serta penguatan UMKM kehutanan.

Pembangunan kehutanan Tahun 2025 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) yang terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Sasaran strategis pembangunan kehutanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. SS1 : Meningkatnya perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan.
- b. SS2 : Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari.
- c. SS3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan melalui akses kelola hutuan yang adil dan sejahtera.
- d. SS 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak.

Implementasi program pengelolaan hutan berkelanjutan pada Ditjen PHL merupakan proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, seperti keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Arah kebijakan tersebut antara lain :

- Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan;
- Peningkatan produktivitas hutan antara lain : melalui pembinaan TPTI, *Reduced Impact Logging (RIL)*, Teknik Silvikultur Intensif/Multi Sistem Silvikultur, Multiusaha Kehutanan dan diversifikasi produk hasil hutan;
- Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Konsesi);
- Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan;
- Peningkatan daya saing industri seperti revitalisasi mesin dan diversifikasi produk industri kehutanan untuk mendukung hilirisasi;
- Optimalisasi penerimaan PNBPN dari *added value*;

- Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.

Adapun strategi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yaitu antara lain :

- Menjamin kepastian usaha
- Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan *Reduced Impact Logging (RIL)* pada hutan alam;
- Multiusaha kehutanan;
- Evaluasi kinerja PBPH;
- Optimalisasi pemanfaatan kawasan;
- Penyelesaian konflik melalui pemberian akses legal;
- Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air;
- Pengelolaan areal hutan pasca penanggulangan Karhutla;
- Kolaborasi Pemanfaatan Hutan untuk ketahanan pangan dan energi;
- Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi, jasa lingkungan, wisata alam dan HHBK;
- Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK;
- Mendorong PBPH untuk membangun industri terintegrasi PBPHH;
- Optimalisasi limbah hasil hutan pasca pengolahan;
- Rasionalisasi kapasitas PBPHH (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan);
- Mendukung ketahanan energy dengan PBPHH pellet;
- Pengembangan HS *code* yang sesuai dengan tren pasar;
- Fasilitasi SVLK untuk usaha kehutanan kecil/UMKM;
- Efisiensi mesin/mendukung peremajaan mesin produksi.

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengoptimalkan pengimplementasian Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen pada Tahun 2025 dengan mengampu 6 (enam) sasaran program yaitu :

1. Meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi;
2. Meningkatnya produktivitas dan hilirisasi hasil hutan;

3. Meningkatnya ekspor produk hasil hutan;
4. Meningkatnya pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan;
5. Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok perhutanan social;
6. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi yang agile, efektif dan efisien.

Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2025

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2025
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Luas penanaman dan pengkayaan kawasan hutan pada area PBPH	428.000 ha
		Meningkatkan produktivitas dan	Produksi hasil hutan	55 juta m ³
			Efektivitas pengelolaan KPH di Hutan Produksi dan Hutan Lindung	20 KPH
		Meningkatnya ekspor produk hasil hutan	Nilai ekspor kayu dan HHBK	10,5 milliar USD
		Meningkatnya pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	2,5 Triliun Rupiah
		Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok perhutanan sosial	Nilai transaksi ekonomi kelompok tani pemanfaatan hutan skema kemitraan konsesi	50 milliar rupiah
2	Dukungan Manajemem	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi Ditjen PHL yang agile, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82 poin
			Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL	3,5 poin

Sumber : Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2025.

Pencapaian kinerja Ditjen PHL dalam upaya pengelolaan hutan tidak lepas dari peran serta dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat lintas Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lintas kementerian/Lembaga, pihak swasta (unit manajemen), NGO Lembaga Donor, akademisi, sampai dengan masyarakat. Pada lingkup BPHL Wilayah XII juga terbentuk *crosscutting* berbagai pihak seperti Es. III lingkup KLHK, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), pihak swasta, unit usaha kehutanan dan masyarakat. Gambaran *crosscutting* dalam lingkup Ditjen PHL dapat dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 8 berikut.



Gambar 3. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL



Gambar 4. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL

Tabel. 9 Matriks Pemetaan Peran (Crosscutting) dalam Pencapaian Kinerja BPHL Wilayah XIII

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Luas penanaman dan pengkayaan kawasan hutan pada area PBPH	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Dit. PUPH, KPH, PSKL, Dishut Prov. KTH, PBPH	Berperan dalam peningkatan penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan
	Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi hasil hutan	Produksi hasil hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	Luas arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung	Dit.PUPH, PBPH, PBPHH, DPR-RI, Lembaga Sertifikasi, BDLHK, PSKL, BKSDAE	Berperan aktif dalam peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan
			Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> Luas areal yang diberikan Perizinan Pemanfaatan Hutan untuk dikelola melalui multiusaha kehutanan Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan 		Dit. BUPH, PBPH, PSKL, Multiusaha Kehutanan

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
			Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Produksi kayu bulat	Dit. BPPHH, PBPHH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan produksi olahan hasil hutan
		Efektivitas pengelolaan KPH di hutan produksi dan hutan lindung	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari	Dit. BPPHH, PBPHH, UMKM Kehutanan	Berperan dalam upaya peningkatan nilai ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat LK
	Meningkatnya ekspor produk hasil hutan	Nilai ekspor produk kayu dan HHBK	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	Dit. IPHH, KPKNL, PBPH	Berperan dalam upaya peningkatan PNBP dan penertiban PUHH
			Meningkatkan ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspor produk olahan hasil hutan 2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK 3. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK 	Dit. IPHH, KPKNL, PBPH	Berperan dalam upaya peningkatan PNBP dan penertiban PUHH

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
	Meningkatnya Pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan	Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya PNBP dari perizinan berusaha pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan 2. Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai RKT 	Dit. PUPH, PBPH, KPH, KTH, PSKL, Akademisi	Bersinergi aktif dalam meningkatkan pembinaan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat
	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok perhutanan sosial	Nilai transaksi ekonomi kelompok tani pemanfaatan hutan skema kemitraan konsesi	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat melalui kemitraan konsesi	Dit. PUPH, PBPH, KPH, KTH, PSKL, Akademisi	Bersinergi aktif dalam meningkatkan pembinaan pemanfaatan hutan yang berbasis masyarakat
Dukungan Manajemen	Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi Ditjen PHL yang agile, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai SAKIP Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Sekditjen PHL, Itjen KLHK, KemepanRB, BPK RI, Kemenkeu	Bersinergi dalam meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, birokrasi, pelaporan yang lebih baik, efektif, efisien dan bertanggung jawab

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
		Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL	Meningkatnya Level Maturitas SPIP pada Ditjen	Level maturitas SPIP Ditjen PHL		

Dalam mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan ***“Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen”*** dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan
2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan
3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring, evaluasi dan capaian kinerja Tahun 2024. Memperhatikan tugas dan fungsi Unit Eselon II dan BPHL, terdapat penyesuaian nomenklatur Rincian Output kegiatan dan penambahan Rincian Output kegiatan. Selain itu alokasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen dialokasikan dengan memperhatikan capaian nilai NKA satker.

Adapun Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XIII disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Matriks Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XIII Tahun 2025

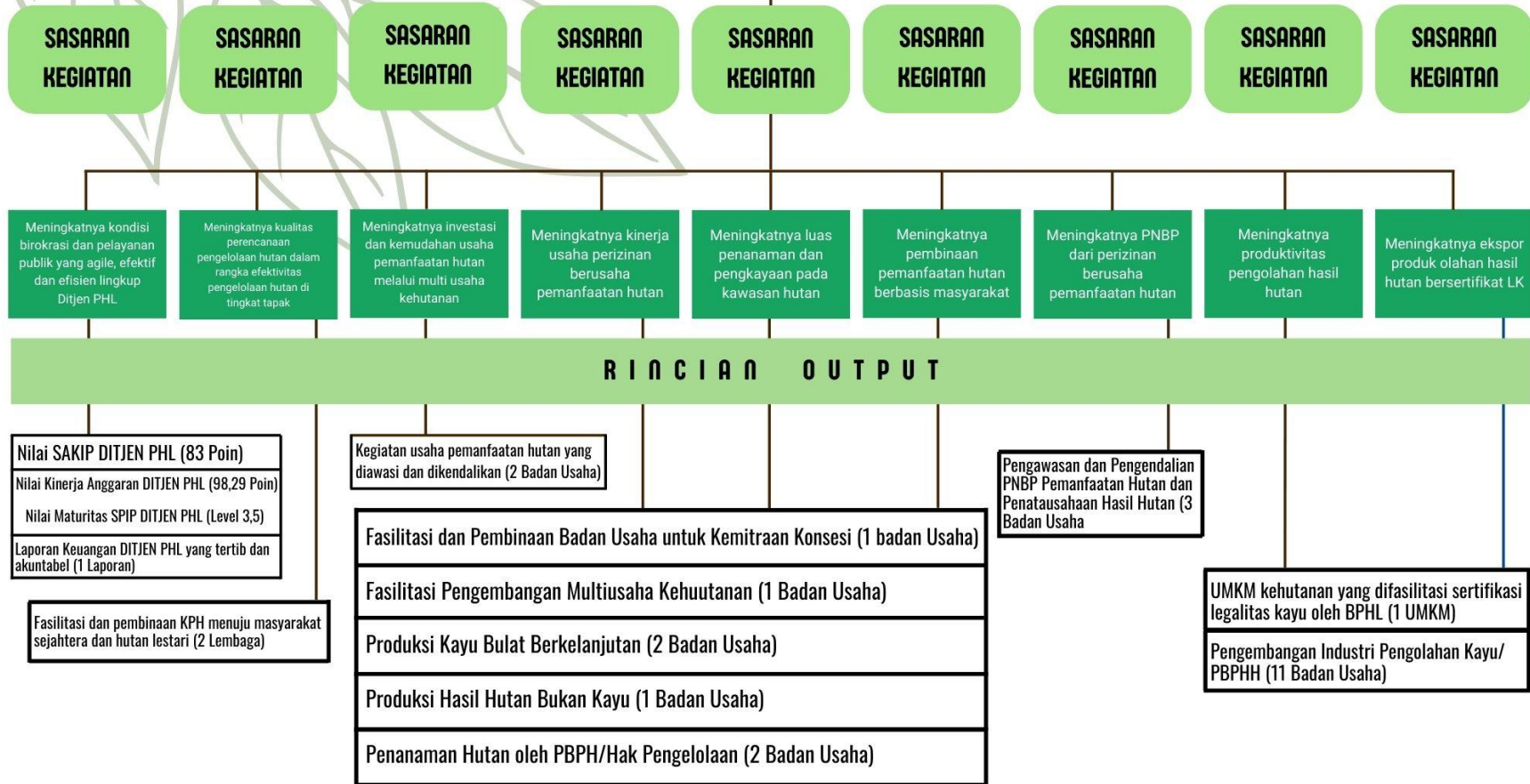
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
A	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
1	T1.SS1. Meningkatkan perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan mendukung dekarbonisasi hutan	Laju Deforestasi dan degradasi hutan	Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Luas penanaman dan pengkayaan kawasan hutan pada area PBPH	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (Dit. PUPH)	Hektar	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	2 Badan Usaha	55.000.000
2	T2.SS1. Meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi hasil hutan	Produksi hasil hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH)	KPH	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	930.375.000
					Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Luas areal yang diberikan Perizinan Pemanfaatan Hutan untuk dikelola melalui multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Ha	Fasilitasi pengembangan multiusaha kehutanan	1 Badan Usaha	215.000.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
						Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH)	Ha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha	190.000.000
					Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Produksi kayu bulat (Dit. PUPH)	m ³	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	2 Badan Usaha	173.000.000
				Efektivitas pengelolaan KPH di hutan produksi dan hutan lindung	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri dan hutan lestari (BRPH)	KPH	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari		
		Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bio prospecting	Meningkatnya ekspor produk hasil hutan	Nilai ekspor kayu dan HHBK	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit.PUPH)	ton	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha	175.000.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
					Meningkatkan ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat LK	Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit.BPPHH)	m ³	Pengembangan industri pengolahan kayu/ PBPHH		
						UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (BPPHH)	UMKM	UMKM Kehutanan yang difasilitasi SVLK oleh BPHL	1 UMKM	650.000.000
						Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (BPPHH)	m ³	Pengembangan industri pengolahan kayu/ PBPHH	11 Badan Usaha	440.000.000
		Nilai PNBP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan	Nilai PNBP dan pemanfaatan hutan	Meningkatnya PNBP dari perizinan berusaha pemanfaatan	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayara iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Wajib Bayar	Pengawasan dan pengendalian PNBP pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	400.000.000
						Perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai RKT (IPHH)	Ha	Kegiatan Usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	154.250.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
		Nilai transaksi kelompok masyarakat petani hutan	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok perhutanan sosial	Nilai transaksi ekonomi kelompok petani pemanfaatan hutan skema kemitraan konsesi	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	Luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat melalui kemitraan konsesi (Dit.PUPH)	Ha	Fasilitasi pengembangan multiusaha kehutanan		
B	Program Dukungan Manajemen									
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional dan berdampak		Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai SAKIP Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Perkantoran	83 Poin	10.441.601.000
				Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya level maturitas SPIP pada Ditjen PHL	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Poin	Layanan Umum	98,29 Poin	150.000.000

POHON KINERJA BPHL WILAYAH XIII TAHUN ANGGARAN 2025



Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun 2025 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-143-06.2.693529/2025 Tanggal 2 Desember 2024 , dengan total anggaran sebesar Rp. 13.974.226.000,- yang terdiri dari :

- a. Rupiah Murni (RM) : Rp. 10.975.251.000,-.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Rp. 2.998.975.000,-.

Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XIII Tahun 2025

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Target		Keterangan
		Fisik	Keuangan	
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	2 Lembaga	930.375.000	
6729.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	930.375.000	
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	2 Badan Usaha	154.250.000	
6730.QIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	2 Badan Usaha	154.250.000	Prioritas Nasional
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	808.000.000	
6731.BDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha	190.000.000	
6731.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha Kehutanan	1 Badan Usaha	215.000.000	Prioritas Nasional
6731.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	2 Badan Usaha	173.000.000	Prioritas Nasional
6731.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha	175.000.000	Prioritas Nasional
6731.QIH.003	Penanaman Hutan oleh PBPH/ Hak Pengelolaan	2 Badan Usaha	55.000.000	Prioritas Nasional
6732	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	400.000.000	

6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	400.000.000	
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1 UMKM	1.090.000.000	
6733.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu	1 UMKM	650.000.000	
6733.QDH.001	Pengembangan Industri Pengolahan Kayu/ Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	11 Badan Usaha	440.000.000	Prioritas Nasional
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen			
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	2 Layanan	10.591.601.000	
5396.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	150.000.000	
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10.441.601.000	
Jumlah			13.974.226.000	

Sumber RKAKL BPHL Wilayah XIII Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan dan pencapaian rincian output kegiatan, BPHL Wilayah XIII Makassar melaksanakan upaya-upaya pencapaian melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan

Implementasi kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari melalui kegiatan (1) Pendampingan dan Pembinaan KPH dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJpd melalui SI-RPHJP KPH dan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH; (2) Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dengan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif, Bimbingan Peningkatan SDM KPH/KTH dan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Produkti. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH).

2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

Implementasi Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan melalui Kegiatan pembinaan teknis/fasilitasi pengajuan PBPH/ penyusunan koordinat geografis. monitoring dan evaluasi bidang usaha pemanfaatan hutan. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH).

3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Implementasi dilaksanakan dengan Kegiatan (1) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi melalui kegiatan fasilitasi/pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh PBPH, dan (2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha Kehutanan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* pengembangan multiusaha kehutanan pada PBPH, fasilitasi dan pembinaan kegiatan multiusaha kehutanan pada PBPH; (3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan kayu; (4) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan bukan kayu/multiusaha kehutanan; (5) Kegiatan Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH).

4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Implementasi dilaksanakan dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tertib PNBPN, PUHH serta rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga profesional, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan PUHH fasilitasi/pembinaan tenaga professional, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan PUHH melalui kegiatan (1) Peningkatan kapasitas aktor PUHH/PNBPN (GANISPH) dan (2) Kinerja Tenaga Teknis, Monitoring dan Evaluasi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH).

5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan (1) UMKM kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL melalui Fasilitasi Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL dengan kegiatan Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan; Bimbingan/Pembinaan Teknis SVLK bagi UMKM Kehutanan; Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; dan Sosialisasi Peraturan SVLK; (2) Kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Kayu/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui kegiatan (a) Fasilitasi peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah melalui kegiatan fasilitasi/pendampingan usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah dan kegiatan bimbingan teknis peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah; (b) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah melalui Kegiatan pengawasan dan pengendalian kinerja usaha industri hasil hutan dan pemantauan harga pasar; dan Kegiatan temu usaha PBPHH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan pemberian layanan berupa (1) Layanan umum seperti pelaksanaan kegiatan rencana program dan anggaran, penyediaan data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan penilaian SAKIP dan penilaian level maturitas SPIP dan (2) Layanan Perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Sekditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 ini dibuat sebagai dokumen sementara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Lestari selama masa transisi pemerintahan. Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 disusun berdasarkan kepada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Tahun 2025 akan disempurnakan kembali setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII.